



Pemodelan Regresi Berganda pada Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

INFO PENULIS

Baharuddin
FMIPA Universitas Halu Oleo
baharuddin.mtmk@uho.ac.id

Refika Allya Arianti
FMIPA Universitas Halu Oleo
RefikaAllyaArianti@gmail.com

Muhammad Ihwal
FMIPA Universitas Halu Oleo
MuhammadIhwal@gmail.com

Makkulau
FMIPA Universitas Halu Oleo
Makkulau@gmail.com

Lilis Laome
FMIPA Universitas Halu Oleo
LilisLaome@gmail.com

Andi Tenri Ampa
FMIPA Universitas Halu Oleo
AndiTenriAmpa@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 3026-3603
Vol. 3, No. 1, April 2025
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajst>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Baharuddin, Arianti, R. A., Ihwal, M., Makkulau, Laome, L., & Ampa, A. T. (2025). Pemodelan Regresi Berganda pada Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia. *Arus Jurnal Sains dan Teknologi*, 3(1), 148-156.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Ada lima variabel yang dijadikan sebagai prediktor. Data jumlah penduduk miskin (Y) tahun 2024 di tingkat provinsi diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (X_1) berpengaruh signifikan terhadap penambahan jumlah penduduk miskin; (2) peningkatan Angka Melek Huruf (X_2) berkontribusi signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin; (3) kenaikan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (X_3) secara signifikan berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin; (4) peningkatan Angka Partisipasi Kasar perguruan tinggi (X_4) memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin; dan (5) kenaikan Upah Minimum Provinsi (X_5) berdampak signifikan pada penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Kata Kunci: kemiskinan, pengangguran, pengeluaran per kapita, tingkat pendidikan, upah minimum

Abstract

This study aims to determine the factors that influence the number of poor people in Indonesia. There are five variables used as predictors. Data on the number of poor people (Y) in 2024 at the provincial level were obtained from the BPS-Statistics Indonesia. This research employs a quantitative approach with multiple regression analysis. The results of the study indicate that: (1) an increase in the unemployment rate (X_1) has a significant effect on the increase in the number of poor people; (2) an increase in the literacy rate (X_2) contributes significantly to a decrease in the number of poor people; (3) an increase in adjusted per capita expenditure (X_3) significantly impacts the increase in the number of poor people; (4) an increase in the gross enrollment ratio of higher education (X_4) has a significant effect on a decrease in the number of poor people; and (5) an increase in the provincial minimum wage (X_5) significantly reduces the number of poor people in Indonesia.

Keywords: education level, expenditure per capita, minimum wage, poverty, unemployment

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan multidimensional yang terus dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih relatif tinggi dan fluktuatif. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025a), pada September 2024, sekitar 24,06 juta jiwa (8,57% dari total populasi) hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini memang mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun disparitas kemiskinan antardaerah dan kerentanan terhadap guncangan ekonomi masih menjadi masalah serius.

Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja, telah diterapkan oleh pemerintah. Namun, efektivitas program-program tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti ketidaktepatan sasaran (Salsabila *et al.*, 2024), lemahnya koordinasi antarlembaga, dan alokasi anggaran yang kurang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis bantuan sosial semata tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi jumlah penduduk miskin menjadi sangat penting.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji dampak pengangguran terhadap kemiskinan. Studi oleh Aginta *et al.* (2025) di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Temuan ini sejalan dengan laporan World Bank (2023), yang mengungkapkan bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja, sehingga kelompok rentan tetap terjebak dalam kemiskinan struktural.

Selain pengangguran, tingkat literasi juga merupakan faktor krusial yang memengaruhi kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Surbakti *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa peningkatan Angka Melek Huruf memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kemampuan masyarakat yang melek huruf untuk mengakses informasi, memperluas peluang kerja, dan mengelola keuangan secara lebih efektif.

Faktor lain yang berkaitan dengan kemiskinan adalah pengeluaran per kapita. Sebagai indikator kesejahteraan ekonomi, pengeluaran per kapita mencerminkan kemampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hasil studi Wulandari dan Pratama (2022) menunjukkan bahwa tingginya pengeluaran per kapita berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin. Namun, efektivitas hubungan ini dapat melemah akibat distribusi pengeluaran yang tidak merata dan tekanan inflasi. Sebagaimana temuan Ningtias dan Anwar (2021) dalam penelitian di Makassar, yang membuktikan bahwa pengeluaran per kapita memiliki pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Angka Partisipasi Kasar dalam pendidikan juga memiliki hubungan erat dengan kemiskinan. Sebagai salah satu indikator dalam mengukur kemajuan sektor pendidikan, Angka Partisipasi Kasar mencerminkan tingkat aksesibilitas penduduk terhadap layanan pendidikan di suatu wilayah. Penelitian Wicaksono dan Aliem (2022) di Provinsi Sulawesi Selatan

mengungkapkan bahwa peningkatan Angka Partisipasi Kasar berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Faktor lain yang memiliki dampak terhadap kemiskinan adalah Upah Minimum Provinsi. Penyesuaian Upah Minimum Provinsi yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja berpenghasilan rendah di sektor formal. Sebagaimana studi Saputri dan Sitorus (2025) di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa setiap kenaikan Upah Minimum Provinsi berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dominan yang memengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia menggunakan data terkini dan pendekatan kuantitatif. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

B. Metodologi

a. Sumber Data

Ada dua jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel respon dan variabel penjelas. Variabel respon Y berupa jumlah penduduk miskin tahun 2024 menurut provinsi di Indonesia, diambil dari laman web Badan Pusat Statistik (BPS, 2024a). Sementara itu, ada lima variabel penjelas X yang digunakan. Variabel X_1 (Tingkat Pengangguran Terbuka) diperoleh dari BPS (2024b), variabel X_2 (Angka Melek Huruf) diambil dari BPS (2024c), variabel X_3 (pengeluaran per kapita yang disesuaikan) diperoleh dari BPS (2024d), variabel X_4 (Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi) diambil dari BPS (2024e), dan variabel X_5 (Upah Minimum Provinsi) diperoleh dari laman web Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker, 2024).

b. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel respon dan variabel penjelas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi operasional variabel respon dan variabel penjelas

Variabel	Definisi Operasional	Satuan
Y Jumlah penduduk miskin	Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah batas minimum pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk di suatu provinsi yang termasuk kategori miskin pada bulan September 2024.	Jiwa
X_1 Tingkat Pengangguran Terbuka	Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja di suatu provinsi pada tahun 2024.	Persen
X_2 Angka Melek Huruf	Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mampu menulis dan membaca terhadap total penduduk berusia 15 tahun ke atas di suatu provinsi pada tahun 2024.	Persen
X_3 Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah ukuran rata-rata pengeluaran per orang untuk konsumsi setahun di suatu provinsi yang telah disesuaikan dengan menggunakan paritas daya beli.	Juta rupiah
X_4 Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa berusia 17-24 tahun yang terdaftar di perguruan tinggi dengan total penduduk berusia 17-24 tahun di suatu provinsi tahun 2024.	Persen
X_5 Upah Minimum Provinsi	Upah Minimum Provinsi adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh gubernur untuk suatu provinsi sebagai standar upah bagi pekerja di wilayah tersebut tahun 2024.	Juta rupiah

c. Prosedur Penelitian

Penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan variabel respon (Y) dan variabel penjelas (X). Hubungan antara variabel respon (Y) dengan masing-masing variabel penjelas (X) diidentifikasi menggunakan matriks diagram pencar. Tahap pemodelan regresi dimulai dengan merumuskan model regresi linear berganda untuk data jumlah penduduk miskin di Indonesia (Y). Selanjutnya, estimasi parameter regresi dilakukan dengan metode kuadrat terkecil. Pengujian signifikansi parameter dilakukan melalui uji simultan dan uji parsial. Selain itu, asumsi klasik regresi (kenormalan galat, homogenitas variansi, dan independensi galat) juga diuji. Artikel ini diakhiri dengan interpretasi dan pembahasan hasil pemodelan regresi yang diperoleh.

C. Hasil dan Pembahasan

Indonesia terbagi menjadi 38 provinsi dengan total penduduk mencapai 281,6 juta jiwa pada tahun 2024 (BPS, 2025b). Berdasarkan data kemiskinan, Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin (Y) tertinggi sebanyak 3,89 juta jiwa, sedangkan Provinsi Kalimantan Utara memiliki jumlah penduduk miskin terendah yaitu 41,11 ribu jiwa (Tabel 2).

Tabel 2. Deskripsi variabel penelitian

Variabel	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Simpangan Baku
Y	41.110,00	633.019,00	3.893.820,00	944.383,00
X_1	1,32	4,38	6,75	1,41
X_2	70,37	96,30	99,75	5,23
X_3	5,71	11,59	19,95	2,46
X_4	12,23	33,60	73,90	10,41
X_5	2,04	3,13	5,07	0,66

Tabel 2 juga menampilkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (X_1) terendah adalah 1,32% terdapat di Provinsi Papua Pegunungan, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi mencapai 6,75% terjadi di Provinsi Jawa Barat. Secara umum, keragaman data Tingkat Pengangguran Terbuka relatif kecil, ditunjukkan oleh nilai simpangan baku sebesar 1,41%.

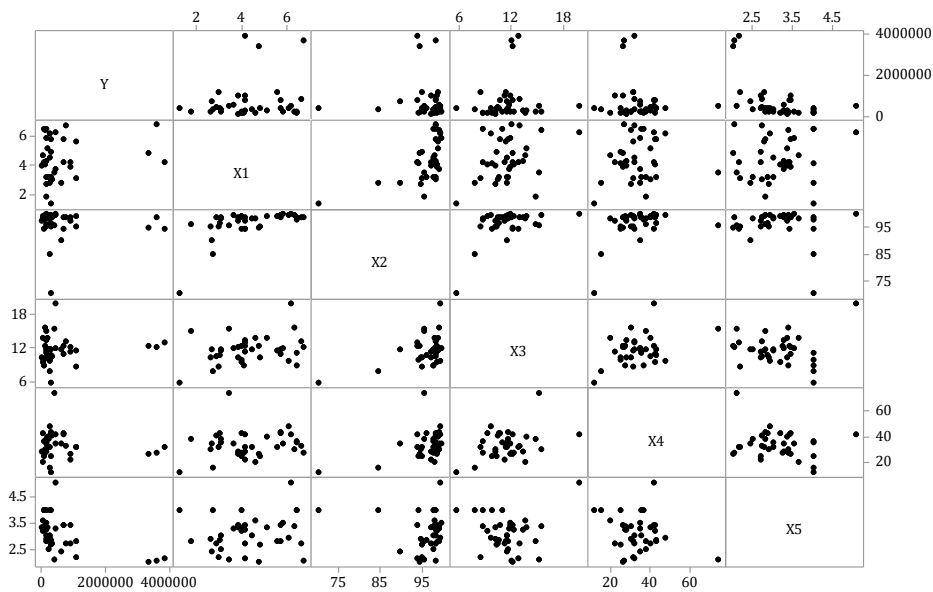
Angka Melek Huruf (X_2) terendah adalah 70,37% tercatat di Provinsi Papua Pegunungan, sedangkan Angka Melek Huruf tertinggi mencapai 99,75% tercatat di Provinsi Sulawesi Utara. Keragaman Angka Melek Huruf menurut provinsi mencerminkan adanya kesenjangan tingkat literasi antardaerah yang tergambarkan melalui simpangan baku 5,23% (Tabel 2).

Rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan (X_3) mencapai Rp11,59 juta per tahun (Tabel 2). Pengeluaran per kapita tertinggi sebesar Rp19,95 juta per tahun dibelanjakan di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan pengeluaran per kapita terendah sebesar Rp5,71 juta per tahun dibelanjakan di Provinsi Papua Pegunungan.

Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (X_4) menurut provinsi cenderung beragam yang ditandai dengan nilai simpangan baku 10,41%. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan akses perguruan tinggi di berbagai daerah. Provinsi DI Yogyakarta memimpin dengan Angka Partisipasi Kasar tertinggi, yaitu 73,90%, sedangkan Provinsi Papua Pegunungan mencatat Angka Partisipasi Kasar terendah, hanya sebesar 12,23%.

Rata-rata Upah Minimum Provinsi di Indonesia berada pada kisaran Rp3,13 juta per bulan dengan variasi antardaerah relatif kecil. Upah Minimum Provinsi tertinggi ditetapkan di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5,07 juta per bulan, sedangkan Upah Minimum Provinsi terendah tercatat di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp2,04 juta per bulan.

Hubungan antara variabel respon (Y) dengan masing-masing variabel penjelas (X) dapat dilihat pada matriks diagram pencar sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Matriks diagram pencar dari variabel $Y, X_1, X_2, X_3, X_4,$ dan X_5

Gambar 1 menunjukkan kecenderungan adanya hubungan linear antara variabel respon Y dengan masing-masing variabel penjelas $X_1, X_2, X_3, X_4,$ dan X_5 . Kecenderungan ini mengarahkan penggunaan model regresi linear berganda untuk menjelaskan keragaman data jumlah penduduk miskin di Indonesia (Y).

Model regresi linear berganda pada data jumlah penduduk miskin di Indonesia (Y) dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$$

dengan X_1 adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, X_2 adalah Angka Melek Huruf, X_3 adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan, X_4 adalah Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, X_5 adalah Upah Minimum Provinsi, β_0 adalah parameter intersep, β_j adalah parameter regresi yang berkaitan dengan variabel penjelas X_j , dan ε adalah galat model regresi.

Estimasi parameter model regresi dilakukan dengan metode kuadrat terkecil. Hasil estimasi memberikan persamaan regresi:

$$\hat{Y} = 9.463.122 + 318.989X_1 - 75.419X_2 + 110.931X_3 - 27.387X_4 - 1.064.020X_5$$

dengan \hat{Y} adalah estimasi dari variabel respon Y .

Pengujian signifikansi terhadap estimasi parameter regresi dilakukan dengan uji simultan dan uji parsial. Uji simultan dilakukan dengan hipotesis:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$$

$$H_1 : \text{minimal ada satu } \beta_j \neq 0 \text{ untuk } j = 1, 2, 3, 4, 5.$$

Hasil pengujian melalui analisis variansi memberikan statistik F_{hitung} sebesar 8,30 dengan nilai p sebesar 0,00 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengarahkan pada penolakan hipotesis H_0 yang menandakan bahwa minimal ada satu variabel penjelas X_j yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon Y . Untuk menelusuri variabel apa saja yang berpengaruh, digunakan uji parsial.

Uji parsial dilakukan dengan mengajukan hipotesis:

$$H_0 : \beta_j = 0 \text{ untuk } j = 1, 2, 3, 4, 5$$

$$H_1 : \beta_j \neq 0.$$

Hasil pengujian memberikan statistik t_{hitung} masing-masing variabel penjelas X_j sebagaimana tertera pada Tabel 3. Nilai p yang dihasilkan dari uji parsial ini adalah kurang dari tingkat signifikansi 0,05 untuk masing-masing variabel penjelas X_j . Hal ini menandakan bahwa semua variabel $X_1, X_2, X_3, X_4,$ dan X_5 berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia (Y).

Tabel 3. Estimasi parameter regresi dan signifikansinya

Prediktor	Estimasi Parameter	t_{hitung}	Nilai p
Intersep	9.463.122	3,65	0,00
X_1	318.989	3,24	0,00

X_2	-75.419	-2,53	0,02
X_3	110.931	2,07	0,04
X_4	-27.387	-2,23	0,03
X_5	-1.064.020	-5,91	0,00

Pemodelan regresi linear berganda pada data jumlah penduduk miskin di Indonesia (Y) memberikan koefisien determinasi (R^2) sebesar 56,46%. Koefisien ini menunjukkan bahwa 56,46% dari keragaman variabel respon Y dapat dijelaskan oleh lima variabel penjelas X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , dan X_5 yang digunakan dalam model. Nilai koefisien determinasi yang belum mencapai angka ideal ini menandakan kompleksitas masalah kemiskinan di Indonesia, yang dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berkaitan (Baharuddin, *et al.*, 2025).

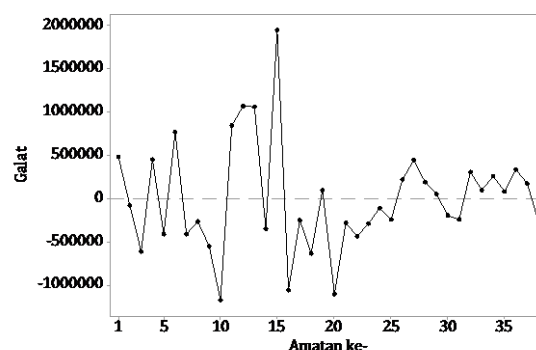
Hasil pemodelan regresi juga menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas yang ada di dalam model tidak menunjukkan adanya multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 bahwa nilai VIF masing-masing variabel penjelas kurang dari 5.

Tabel 4. Nilai VIF masing-masing variabel penjelas

Variabel Penjelas	Nilai VIF
X_1 (Tingkat Pengangguran Terbuka)	1,60
X_2 (Angka Melek Huruf)	2,00
X_3 (Pengeluaran per kapita yang disesuaikan)	1,43
X_4 (Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi)	1,35
X_5 (Upah Minimum Provinsi)	1,15

Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam pemodelan regresi linear berganda agar memberikan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Asumsi tersebut adalah kenormalan galat, homoskedastisitas, dan independensi galat. Asumsi kenormalan galat dapat diuji dengan hipotesis nol (H_0) adalah galat model regresi berdistribusi normal, versus hipotesis alternatif (H_1) adalah galat model tidak berdistribusi normal. Hipotesis tersebut dapat diuji dengan statistik Kolmogorov-Smirnov (KS). Uji ini membandingkan distribusi empiris dari sampel data dengan distribusi teoritis (normal) dan sesuai digunakan pada data berukuran kecil. Hasil pengujian memberikan statistik KS = 0,09 dengan nilai $p = 0,49$ yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Ini berarti bahwa galat model regresi berdistribusi normal.

Asumsi homoskedastisitas menyatakan bahwa variansi dari galat model regresi bernilai konstan atau sebaran data di sekitar garis regresi adalah seragam. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji asumsi homoskedastisitas. Eksplorasi tahap pertama adalah dengan menggunakan diagram pencar. Gambar 2 menunjukkan bahwa pencaran galat di sekitar garis nol tidak membentuk pola tertentu.



Gambar 2. Diagram pencar antara estimasi galat dengan urutan amatan

Pengujian lebih lanjut terhadap asumsi homoskedastisitas dapat menggunakan uji Park. Uji Park dilakukan dengan meregresikan logaritma natural dari kuadrat galat terhadap variabel penjelas. Hasil pengujian terhadap variabel X_4 memberikan nilai $p = 0,15$ yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi pada variabel tersebut.

Asumsi independensi galat menyatakan bahwa galat pada setiap amatan dalam model regresi tidak saling berkaitan. Asumsi ini dapat diuji dengan hipotesis nol (H_0) adalah galat model regresi saling bebas pada berbagai tingkat lag, versus hipotesis alternatif (H_1) adalah otokorelasi

dalam galat model regresi terjadi pada lag tertentu. Hipotesis tersebut dapat dievaluasi dengan uji Breusch-Godfrey. Uji ini membantu mendeteksi otokorelasi pada berbagai tingkat lag. Hasil pengujian memberikan statistik LM = 0,38 dengan nilai $p = 0,54$ yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Ini berarti bahwa tidak cukup bukti untuk menolak H_0 , dalam hal ini, galat model regresi saling bebas.

Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Ketidakterediaan lapangan pekerjaan menyebabkan hilangnya pendapatan rumah tangga, yang pada akhirnya mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Setiap kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk miskin (Aginta *et al.*, 2025). Penelitian World Bank (2023) juga mengungkapkan bahwa pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja, sehingga kelompok rentan tetap terjebak dalam kemiskinan struktural. Selain itu, pengangguran jangka panjang berkorelasi kuat dengan kemiskinan kronis karena keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal dan program perlindungan sosial. Tinjauan agregat ini searah dengan kerangka teori ekonomi pembangunan yang menyatakan bahwa pengangguran menurunkan pendapatan dan mengangkat risiko kemiskinan, terutama di kawasan dengan tingkat informalitas dan daya serap angkatan kerja rendah.

Angka Melek Huruf memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat literasi, jumlah penduduk miskin cenderung berkurang. Literasi memengaruhi akses individu terhadap lapangan kerja berkualitas, peningkatan produktivitas, dan kemampuan mengelola keuangan. Selain itu, peningkatan Angka Melek Huruf berkorelasi dengan penurunan ketimpangan pendapatan, karena pendidikan membuka peluang partisipasi dalam sektor ekonomi modern. Namun, faktor lain seperti infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan kesenjangan digital juga turut berperan. Kenaikan Angka Melek Huruf akan diikuti oleh pengurangan jumlah penduduk miskin di Indonesia (Surbakti *et al.*, 2023).

Pengeluaran per kapita merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat karena mencerminkan kemampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Semakin tinggi pengeluaran per kapita, jumlah penduduk miskin cenderung menurun (Wulandari & Pratama, 2022). Namun demikian, distribusi pengeluaran yang tidak merata serta inflasi dapat melemahkan dampak tersebut, seperti terlihat di beberapa daerah dengan ketimpangan ekonomi tinggi. Sebagaimana halnya temuan penelitian ini bahwa pengeluaran per kapita yang disesuaikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ningtias dan Anwar (2021) di Makassar.

Angka Partisipasi Kasar perguruan tinggi merupakan indikator dalam mengukur tingkat aksesibilitas pendidikan tinggi di suatu daerah. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian Wicaksono dan Aliem (2022) di Provinsi Sulawesi Selatan. Angka Partisipasi Kasar yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar mampu mengurangi kesenjangan keterampilan dan meningkatkan peluang kerja. Namun, ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah menyebabkan dampak Angka Partisipasi Kasar terhadap pengurangan kemiskinan tidak merata, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.

Penetapan Upah Minimum Provinsi memiliki dampak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hal ini searah dengan hasil penelitian Saputri dan Sitorus (2025) di Pulau Sumatera. Kenaikan Upah Minimum Provinsi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dengan meningkatkan pendapatan pekerja berupah rendah, terutama di sektor formal. Namun demikian, efeknya terbatas karena sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor informal yang tidak tercakup oleh kebijakan upah minimum.

D. Kesimpulan

Pemodelan regresi berganda pada penelitian ini memberikan simpulan:

- a) Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia.
- b) Angka Melek Huruf memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

- c) Pengeluaran per kapita yang disesuaikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.
- d) Angka Partisipasi Kasar pada perguruan tinggi memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia.
- e) Upah Minimum Provinsi memiliki dampak signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

E. Saran

Beberapa rekomendasi dapat diajukan dari hasil penelitian ini:

- a) Diperlukan kebijakan yang fokus pada penciptaan lapangan kerja inklusif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penguatan program bantuan sosial berbasis target untuk mengurangi dampak pengangguran terhadap kemiskinan.
- b) Upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan sebaiknya diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan program pelatihan keterampilan berbasis literasi.
- c) Kebijakan di bidang pendidikan sebaiknya tidak hanya berfokus pada perluasan akses, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pembelajaran dan penyesuaian kurikulum agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja.
- d) Penetapan Upah Minimum Provinsi perlu didukung oleh kebijakan pendamping, seperti pelatihan keterampilan dan perluasan lapangan kerja formal

F. Referensi

- Aginta, C., Tampubolon, M., Manurung, M. P., Tobing, R. D., & Rahayu, T. (2025). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara pada Tahun 2000-2023. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 7075-7088.
- Baharuddin, Agusrawati, & Laome, L. (2025). Pemodelan Regresi Spasial pada Tingkat Kemiskinan di Pulau Sulawesi. *ESTIMASI: Journal of Statistics and Its Application*, 6(1), 89-100.
- BPS (2024a). Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2024 (Kolom September 2024), diakses 4 Februari 2025 melalui [Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia](#)
- BPS (2024b). Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen) 2024 (Kolom Agustus 2024), diakses 7 Februari 2025 melalui [Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia](#)
- BPS (2024c). Angka Melek Aksara Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi (Persen) 2024, diakses 9 Februari 2025 melalui [Angka Melek Aksara Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia](#)
- BPS (2024d). Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2024, diakses 9 Februari 2025 melalui [\[Metode Baru\] Pengeluaran per Kapita Disesuaikan - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia](#)
- BPS (2024e). Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi 2024, diakses 12 Februari 2025 melalui [Angka Partisipasi Kasar \(APK\) Perguruan Tinggi \(PT\) Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia](#)
- BPS (2025a). Profil Kemiskinan di Indonesia, September 2024. *Berita Resmi Statistik*, No. 07/01.
- BPS (2025b). *Statistik Indonesia 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Kemnaker (2024). Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024, diakses 17 Februari 2025 melalui [Satudata Kemnaker | Portal Data Ketenagakerjaan RI](#)
- Ningtias, E. N. A. & Anwar, A. F. (2021). Mengukur Dampak Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Pengeluaran Per Kapita terhadap Kemiskinan di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies*, 1(1), 1-12.
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-13.
- Saputri, S. A. A. & Sitorus, A. (2025). Analisis Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi dan Investasi PMDN terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(1), 251-267.
- Surbakti, S. P. P., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2021. *Ecoplan*, 6(1), 37-45.

- Wicaksono, B. R. & Aliem, M. (2022). Investasi Pendidikan Memutus Rantai Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Litbang Sukowati*, 5(2), 12-24.
- World Bank (2023). *Indonesia Economic Prospects: The Invisible Toll of COVID-19 on Learning*. Washington: World Bank Group.
- Wulandari, I. & Pratama, A. A. N. (2022). Analisis Pengaruh Dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah), Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2010-2021. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3301-3309.